

ABSTRAK

Aktivitas bisnis merupakan penggerak perekonomian masyarakat, di berbagai negara mengalami penurunan sejak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan berbagai Penanganan *Covid-19* termasuk di Indonesia demi melindungi warga negaranya mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2021 (INMENDAGRI No.35 tahun 2021) tentang pelaksanaan PPKM membagi PPKM menjadi beberapa level, termasuk di Kota Semarang Pemberlakuan PPKM juga diadakan namun kebijakan pemerintah tersebut berpengaruh terhadap dunia bisnis Restoran BAKSU yang diangkat dalam penelitian skripsi berjudul Pengaruh Kebijakan Penurunan PPKM Level 4 Ke Level 2 Kota Semarang Terhadap Keberlangsungan Bisnis Restoran Bakmie & Katsu (BAKSU) di Tembalang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *yuridis empiris* yang meneliti peristiwa hukum di masyarakat kaitannya dengan pemberlakuan PPKM atau implementasi ketentuan hukum *normative* terhadap masyarakat dengan pendekatan secara sosiologis hukum agar dapat melihat keadaan sesungguhnya terjadi di masyarakat dengan mengambil data dari fakta di lapangan melalui spesifikasi penelitian *deskriptif* yang berdasarkan kenyataan menggambarkan dengan lengkap keadaan, gejala dan perilaku individu atau kelompok dari data primer yang diambil melalui hasil observasi dan wawancara serta data sekunder yang terdiri dari ketentuan hukum berkaitan sebagai bahan hukum primer dan berbagai literatur buku dan jurnal sebagai bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti Buku kamus memberikan jawaban bahwa Pengaruh kebijakan penurunan PPKM level 4 ke level 2 Kota Semarang terhadap keberlangsungan bisnis restoran Bakmie & Katsu (BAKSU) di Tembalang dengan adanya aturan PPKM yang dikeluarkan pemerintah sebagai kekuasaan legitimasi hukum suatu kebijakan publik menjadi ketentuan hukum pelaksana pengaturan kondisi *covid 19* yang dikeluarkan demi keamanan masyarakat namun PPKM juga sangat mempengaruhi kelangsungan bisnis restoran dan dengan adanya kebijakan penurunan PPKM Level 4 ke Level 2 berpengaruh signifikan terhadap kenaikan omzet usaha BAKSU kembali memperoleh keuntungan kemudian keberlanjutan perjanjian bisnis pelaku usaha terhadap pihak ketiga dengan adanya PPKM melalui pengetahuan hukum bisnis sebagai perangkat hukum yang mengatur berbagai cara usaha agar segala risiko bahkan akibat *covid 19* dan PPKM pengusaha BAKSU agar mendapatkan profit menciptakan inovasi layanan *online* serta membuat perjanjian bisnis BAKSU dengan pihak ketiga, juga melakukan restrukturisasi/penundaan pembayaran dengan *addendum* surat perjanjian. Saran kepada pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan juga memberi jalan keluar bagaimana kegiatan usaha masyarakat yang memiliki ekonomi lemah tetap bisa bertahan dan kepada pelaku usaha bisnis lebih cara pemilihan usaha kemudian melibatkan usahanya pada dunia *online* dan *delivery* mengingat kondisi covid harus disikapi bersama tidak hanya oleh pemerintah.

Kata Kunci: Kebijakan, PPKM, Bisnis Baksu

ABSTRACT

Business activity is a driving force for the community's economy, in various countries it has decreased since the Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pandemic and various Covid-19 handlings, including in Indonesia in order to protect its citizens, issued the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 35 of 2021 (INMENDAGRI No. 35 of 2021). 2021) regarding the implementation of PPKM dividing PPKM into several levels, including in Semarang City. PPKM implementation was also held but the government policy affected the BAKSU Restaurant business world which was appointed in a thesis research entitled The Effect of Policy on Decreasing PPKM Level 4 to Level 2 Semarang City on the Sustainability of Restaurant Business Bakmie & Katsu (BAKSU) in Tembalang. This study uses an empirical juridical legal research method that examines legal events in the community in relation to the implementation of PPKM or the implementation of normative legal provisions on the community with a legal sociological approach in order to see the actual situation happening in the community by taking data from facts in the field through descriptive research specifications that based on reality, fully describe the circumstances, symptoms and behavior of individuals or groups from primary data taken through observations and interviews as well as secondary data consisting of relevant legal provisions as primary legal materials and various book and journal literature as secondary legal materials and tertiary legal materials such as the dictionary book provides an answer that the effect of the policy of reducing PPKM level 4 to level 2 Semarang City on the sustainability of the Bakmie & Katsu (BAKSU) restaurant business in Tembalang with the PPKM rules issued by the government ah as the power of legal legitimacy, a public policy becomes a legal stipulation implementing the regulation of covid 19 conditions issued for public safety but PPKM also greatly affects the continuity of the restaurant business and with the policy of decreasing PPKM Level 4 to Level 2 a significant effect on the increase in business turnover BAKSU returns to profit then the continuation of business agreements with business actors against third parties with the existence of PPKM through knowledge of business law as a legal instrument that regulates various business methods so that all risks, even due to covid 19 and PPKM entrepreneurs BAKSU to get profit, create online service innovations and make BAKSU business agreements with third parties , also restructured/delayed payments with an added endum of agreement. Suggestions to the government in issuing policies also provide a way out of how the business activities of people who have a weak economy can still survive and to business entrepreneurs how to choose a business and then involve their business in the online world and delivery considering the Covid condition must be addressed together not only by the government.

Keywords: Policy, PPKM, Baksu Business